

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Evaluasi kebijakan penggunaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, didasarkan pada teori William Dunn (1994:405), yang meliputi 6 indikator yakni Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan, yang secara singkat disimpulkan sebagai berikut:

a) Efektifitas

Efektifitas dalam evaluasi kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Wolofeo telah berjalan dengan efektif. Pelaksanaan berbagai program pembangunan yang tercantum dalam RKPDes dan APBDes menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Pemerintah desa bersama BPD dan masyarakat berhasil menjaga koordinasi yang baik, sehingga meskipun terdapat kendala teknis seperti cuaca dan keterlambatan material, kegiatan tetap terlaksana dengan optimal. Transparansi dalam proses monitoring dan pelaporan juga menjadi indikator keberhasilan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, efektivitas kebijakan ini terlihat dari dampak positifnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta pendapatan warga, yang pada akhirnya memperkuat kemandirian ekonomi desa. Tingginya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan adanya rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap hasil pembangunan. Meskipun demikian, partisipasi pada tahap evaluasi masih perlu ditingkatkan agar proses penilaian dan perbaikan kebijakan ke depan menjadi lebih komprehensif. Dengan

demikian, Dana Desa di Desa Wolofeo terbukti berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

b) Efisiensi

Efisiensi dalam evaluasi kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Wolofeo telah menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Dana yang dialokasikan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Prinsip efisiensi tercermin dari kemampuan pemerintah desa dalam memaksimalkan hasil dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, serta menjaga agar setiap kegiatan tetap sesuai dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan ketidaktepatan sasaran pada program tertentu, secara umum pengelolaan dana berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup warga desa.

Selain itu, komitmen pemerintah desa terhadap transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga efisiensi pelaksanaan Dana Desa. Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan secara rutin, pemerintah desa dapat meminimalkan potensi pemborosan, memperbaiki perencanaan, serta memastikan bahwa setiap program tepat waktu dan tepat manfaat. Upaya ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik, tetapi juga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan di Desa Wolofeo.

c)Kecukupan

kecukupan penggunaan Dana Desa di Desa Wolofeo sudah memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada sektor

infrastruktur dan bantuan sosial. Meskipun demikian, jumlah dana yang diterima masih belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes dan RKPDes. Kekurangan anggaran sekitar 20–30% dari total kebutuhan ideal menyebabkan pemerintah desa perlu menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan program agar kegiatan yang bersifat mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Upaya efisiensi anggaran dan penjadwalan ulang program menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang terbatas tersebut.

Secara umum, Dana Desa di Wolofeo telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang mencakup pembangunan fisik maupun nonfisik melalui proses musyawarah desa yang partisipatif. Namun, beberapa kelompok masyarakat seperti pemuda dan pelaku usaha kecil masih belum sepenuhnya merasakan manfaat program akibat keterbatasan dana dan luasnya cakupan kebutuhan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan memperkuat perencanaan keuangan dengan mencari sumber pendapatan alternatif, seperti kerja sama antar desa, pengembangan BUMDes, serta optimalisasi potensi lokal. Dengan pengelolaan yang transparan, partisipatif, dan efisien, Dana Desa diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Desa Wolofeo.

- d) Pemerataan pemerataan dalam evaluasi kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Wolofeo telah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah desa berupaya untuk memastikan bahwa setiap dusun, yakni Nuagiu, Nuasipi, Jalan Sumbu, dan Detubapa, memperoleh manfaat dari program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Upaya ini mencerminkan adanya komitmen terhadap keadilan distributif serta transparansi dalam

pengelolaan Dana Desa. Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran dan perbedaan kondisi geografis antarwilayah, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah desa menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat Wolofeo.

Selain itu, keberhasilan kebijakan penggunaan Dana Desa di Wolofeo juga tidak lepas dari peran aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Melalui mekanisme musyawarah dusun dan musyawarah desa, aspirasi warga dapat tersalurkan dengan baik, sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan pengawasan turut memperkuat akuntabilitas publik serta mencegah potensi penyalahgunaan dana. Ditambah dengan kemampuan pemerintah desa untuk bersikap fleksibel dan tanggap terhadap situasi darurat tanpa mengabaikan regulasi, pengelolaan Dana Desa di Wolofeo dapat dikategorikan efektif dan adaptif. Secara keseluruhan, kombinasi antara pemerataan, partisipasi, dan responsivitas ini menjadi fondasi penting dalam mencapai tujuan utama Dana Desa, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

e) Responsivitas

Responsivitas dalam penggunaan Dana Desa di Desa Wolofeo, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa menunjukkan tingkat ketanggapan yang sangat baik terhadap berbagai kebutuhan dan kondisi masyarakat. Kemampuan aparatur desa dalam merespons situasi darurat seperti bencana angin puting beliung dan angin Seroja mencerminkan adanya kesiapsiagaan serta mekanisme kerja yang adaptif dan efektif. Keberadaan pos belanja tidak terduga dan anggaran cadangan dalam APBDes menjadi bukti nyata bahwa perencanaan keuangan desa telah

mempertimbangkan aspek antisipatif terhadap keadaan darurat tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Wolofeo mampu menjalankan fungsi pelayanan publik dengan cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, tingkat kesesuaian program dengan aspirasi masyarakat juga menjadi cerminan kuat dari penerapan prinsip partisipatif dalam pengelolaan Dana Desa. Melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga memperkuat rasa memiliki serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, responsivitas yang tinggi disertai partisipasi dan transparansi menjadikan tata kelola Dana Desa di Desa Wolofeo semakin adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seluruh warga desa.

f) Ketepatan

Ketepatan pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Wolofeo telah berjalan dengan cukup baik dan mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip ketepatan, kesesuaian, serta partisipasi masyarakat. Setiap kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam RKPDes dan APBDes, yang disusun melalui proses musyawarah desa secara demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Wolofeo tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemerintah desa, tetapi juga melibatkan aspirasi masyarakat. Upaya pemerintah desa dalam memastikan ketepatan sasaran, waktu, dan jenis kegiatan menjadi faktor penting dalam

menjamin bahwa setiap penggunaan dana benar-benar menjawab kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti petani dan pelaku usaha kecil.

Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan serta keterbatasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Meskipun pemerintah desa telah menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi kondisi darurat melalui prosedur perubahan RKPDes dan APBDes secara resmi, transparansi dan akuntabilitas masih perlu ditingkatkan. Keterbukaan informasi yang lebih luas dan pembaruan data secara rutin akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan program. Dengan demikian, peningkatan kedisiplinan terhadap jadwal pelaksanaan dan komitmen terhadap transparansi akan menjadi kunci penting dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa

Wolofeo.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengumpulkan beberapa saran sebagai berikut :

a. Efektifitas

Pemerintah Desa Wolofeo disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa, khususnya pada tahap evaluasi pelaksanaan program. Meskipun pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan, keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu membangun mekanisme evaluasi yang lebih partisipatif, seperti pembentukan tim evaluasi desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD,

tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda. Selain itu, penyelenggaraan forum evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan secara berkala penting dilakukan agar setiap program dapat dinilai secara objektif dan dijadikan dasar perbaikan kebijakan pada periode berikutnya.

b. Efisiensi

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan Dana Desa, pemerintah desa diharapkan mampu memperkuat perencanaan dan pengelolaan anggaran secara lebih cermat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan analisis kebutuhan dan biaya sebelum menetapkan program prioritas, serta mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja lokal melalui program padat karya. Langkah ini tidak hanya mampu menekan biaya pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan agar pengelolaan Dana Desa semakin profesional dan akuntabel.

c. Kecukupan

Terkait aspek kecukupan anggaran, pemerintah Desa Wolofeo perlu melakukan upaya strategis untuk mengatasi keterbatasan Dana Desa yang belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Salah satu langkah konkret yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara lebih optimal sesuai dengan potensi lokal desa. Selain itu, pemerintah desa juga dapat menjalin kerja sama antar desa maupun dengan pihak lain, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta, guna membuka peluang pendanaan alternatif yang dapat mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

d. Pemerataan

Dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah desa diharapkan terus menjaga prinsip keadilan distributif dalam alokasi Dana Desa. Penyusunan peta kebutuhan pembangunan per dusun dapat menjadi langkah nyata untuk memastikan bahwa setiap wilayah memperoleh program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Selain itu, keterlibatan kelompok masyarakat seperti pemuda, perempuan, dan pelaku usaha kecil perlu lebih ditingkatkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Wolofeo.

e. Responsifitas

Responsivitas pemerintah desa yang selama ini telah berjalan dengan baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah desa disarankan untuk menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses serta melakukan pendataan kebutuhan masyarakat secara berkala. Keberadaan anggaran darurat dalam APBDes perlu terus dioptimalkan dengan prosedur yang jelas agar pemerintah desa mampu merespons berbagai kondisi darurat secara cepat dan tepat tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

f. Ketepatan

Untuk meningkatkan ketepatan pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Desa, pemerintah desa perlu memastikan bahwa setiap program dilaksanakan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Keterbukaan informasi mengenai APBDes dan realisasi anggaran perlu ditingkatkan melalui papan informasi desa maupun media komunikasi lainnya.

Dengan transparansi yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa semakin meningkat.